



Article Informations
Corresponding Email:
rizkimn526@gmail.com

Received: 05/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

KEBIJAKAN *MAXIMUM PRESSURE* AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN TAHUN 2018-2020

Rizki Mochamad Noor

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan maximum pressure Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada era kepemimpinan Donald Trump (2018–2020). Dengan menggunakan pendekatan teori neorealisme, penelitian ini menilai dinamika hubungan kekuasaan dalam sistem internasional yang anarkis. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil melemahkan ekonomi Iran, namun gagal dalam menghentikan program nuklirnya. Sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, serta pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani menjadi bagian dari strategi tekanan maksimum. Respons Iran berupa peningkatan pengayaan uranium menunjukkan resistensi terhadap kebijakan koersif AS. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan multilateral dan diplomasi untuk merespons isu-isu nuklir secara efektif.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Iran, *maximum pressure*, program nuklir, kebijakan luar negeri

Abstract

This study aims to analyze the United States' maximum pressure policy towards Iran's nuclear program during Donald Trump's administration (2018–2020). Using the neorealism theory, this research assesses the power dynamics in an anarchic international system. The method employed is descriptive-qualitative through literature review and document analysis. The findings indicate that the policy succeeded in weakening Iran's economy but failed to stop its nuclear development. Economic sanctions, diplomatic isolation, and the assassination of General Qassem Soleimani were part of this coercive strategy. Iran's response, which included increased uranium enrichment, illustrates resistance against US coercion. This study highlights the importance of multilateral approaches and diplomacy to effectively address nuclear issues.

Keywords: United States, Iran, *maximum pressure*, nuclear program, foreign policy

1. PENDAHULUAN

Program nuklir Iran telah menjadi isu yang menonjol dalam hubungan internasional sejak dekade 2000-an, ketika program pengayaan uraniumnya mulai menimbulkan kekhawatiran dari komunitas internasional. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, melihat ambisi nuklir Iran sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas regional dan global. Ketegangan ini memuncak pada tahun 2015 ketika Iran bersama enam negara besar dunia (P5+1) menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), sebuah kesepakatan yang bertujuan membatasi aktivitas nuklir Iran dan menetapkan mekanisme pengawasan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai imbal balik atas pencabutan sanksi ekonomi. JCPOA dianggap sebagai pencapaian diplomatik besar yang berhasil menurunkan eskalasi ketegangan terkait program nuklir Iran melalui jalur negosiasi dan kerja sama multilateral.

Namun, dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah drastis sejak terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden pada 2016. Di bawah pemerintahan Trump, AS mengadopsi pendekatan unilateralis yang menolak komitmen multilateral yang dibangun oleh pendahulunya. Pada Mei 2018, Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari JCPOA dan mengumumkan kebijakan *maximum pressure* terhadap Iran, yang mencakup penerapan kembali sanksi ekonomi secara menyeluruh, upaya isolasi diplomatik, serta langkah-langkah militer simbolik seperti asasinasi Jenderal Qassem Soleimani pada 2020. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memaksa Iran menghentikan program nuklirnya, menarik dukungan terhadap kelompok milisi regional, dan menerima perjanjian baru yang lebih ketat dalam hal kontrol nuklir dan rudal balistik. Namun, kebijakan ini justru mendorong Iran untuk meningkatkan pengayaan uranium dan mengurangi komitmen terhadap ketentuan JCPOA, yang pada akhirnya membangkitkan kembali kekhawatiran global terhadap potensi proliferasi senjata nuklir di kawasan tersebut.¹

¹ International Atomic Energy Agency (IAEA), *Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015)*, GOV/2019/55, 2019.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menganalisis bagaimana kebijakan tekanan maksimum digunakan oleh negara hegemon untuk mencapai tujuan geopolitik dan bagaimana negara target merespons strategi koersif tersebut. Studi ini berupaya menjawab pertanyaan kunci: apakah kebijakan maximum pressure berhasil mencapai tujuannya? Fokus utama diarahkan pada periode 2018–2020 yang merupakan fase paling agresif dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini juga penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika hubungan antara tekanan ekonomi dan perilaku strategis negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis.

Secara akademik, kajian ini memberikan kontribusi terhadap literatur hubungan internasional, khususnya dalam ranah kebijakan luar negeri, penggunaan sanksi sebagai alat tekanan, dan resistensi negara terhadap hegemoni global. Kebijakan maximum pressure menjadi studi kasus penting mengenai bagaimana negara adidaya seperti Amerika Serikat memanfaatkan kekuatan strukturalnya untuk mempengaruhi perilaku negara lain tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung. Di sisi lain, respons Iran terhadap tekanan ini menunjukkan bahwa negara yang menjadi sasaran kebijakan koersif tidak selalu tunduk, melainkan justru dapat mengembangkan strategi resistensi dan aliansi baru untuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan pendekatan neorealisme, khususnya gagasan Kenneth Waltz tentang sistem internasional yang anarkis dan perilaku negara yang ditentukan oleh struktur sistem tersebut. Neorealisme memandang bahwa negara, sebagai aktor utama dalam sistem internasional, bertindak berdasarkan prinsip *self-help*, yaitu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menjamin kelangsungan hidup dan keamanannya.² Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri AS terhadap Iran mencerminkan penggunaan kekuatan struktural (*structural power*), yang dimanifestasikan melalui dominasi atas sistem keuangan global, kontrol terhadap akses pasar internasional, dan pengaruh besar dalam lembaga-

² Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (New York: McGraw-Hill, 1979).

lembaga keuangan internasional.³ Iran sebagai pihak yang ditekan menunjukkan respons khas negara yang berada dalam posisi bertahan—meningkatkan pengayaan uranium, mengembangkan hubungan dengan Rusia dan Tiongkok, serta memperkuat jaringan milisi regional sebagai bentuk penyeimbang terhadap tekanan eksternal.

Tinjauan pustaka dari sejumlah studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa kebijakan tekanan maksimum memiliki konsekuensi kompleks. Fiedler (2020) menyatakan bahwa sanksi ekonomi AS memang berhasil menghancurkan struktur ekonomi Iran, tetapi gagal mencapai perubahan kebijakan yang signifikan karena tidak diiringi dengan jalur diplomasi yang kredibel.⁴ Sementara itu, Nematpour dan Shariati (2020) menekankan bahwa kebijakan tekanan tersebut justru memperkuat sektor pertahanan dan teknologi militer Iran sebagai respons terhadap isolasi global⁵. Azizi et al. (2021) juga menunjukkan bahwa Iran justru semakin aktif dalam membentuk aliansi strategis di luar blok Barat sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan hegemonik.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah dengan menelaah hubungan antara tekanan maksimum, struktur sistem internasional, dan kapasitas resistensi negara melalui perspektif neorealisme struktural.

2. PEMBAHASAN

Strategi dan Tujuan Kebijakan *Maximum Pressure*

Setelah penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA pada 8 Mei 2018, Presiden Donald J. Trump mengumumkan kebijakan *maximum pressure* sebagai strategi utama dalam menghadapi Iran. Langkah ini menandai pergeseran dari pendekatan diplomatik multilateral yang menekankan konsensus internasional, menuju strategi unilateralis yang mengandalkan kekuatan ekonomi dan politik AS secara langsung. Tujuan utama kebijakan

³ Susan Strange, *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

⁴ Christina Fiedler, "Maximum Pressure Strategy: A Critical Assessment of US Sanctions Policy toward Iran under Donald Trump," *Global Affairs Review*, vol. 4, no. 1, (2020) 1–15.

⁵ Leila Nematpour and Mohsen Shariati, "Iran's Defense Strategy in the Face of Trump's Sanctions," *Iranian Review of Foreign Affairs*, vol. 10, no. 1, (2020) 5–32.

⁶ Hamidreza Azizi et al., "Iran's Strategic Calculations in the Face of US Maximum Pressure," *Middle East Policy*, vol. 28, no. 2, (2021) 44–60.

ini adalah tiga hal: pertama, mencegah Iran memperoleh kemampuan senjata nuklir; kedua, menghentikan dukungan Iran terhadap aktor-aktor non-negara di kawasan (seperti Hizbullah, Houthi, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah); dan ketiga, memaksa Iran untuk menerima kesepakatan baru yang lebih ketat, komprehensif, dan mendukung kepentingan keamanan AS dan sekutunya.⁷

Dalam praktiknya, kebijakan ini diwujudkan dalam gelombang sanksi ekonomi besar-besaran, termasuk pemulihan sanksi yang dicabut di bawah JCPOA dan pemberlakuan sanksi baru yang mencakup sektor minyak, gas, petrokimia, perbankan, pelayaran, penerbangan, dan perdagangan logam. Selain itu, AS juga memberlakukan sanksi sekunder kepada negara dan perusahaan yang tetap melakukan transaksi ekonomi dengan Iran, memaksa mereka memilih antara berbisnis dengan Iran atau dengan AS.⁸ Langkah ini menyebabkan negara-negara Eropa, perusahaan multinasional, dan bahkan sekutu AS seperti Korea Selatan menghentikan kerja sama ekonomi dengan Iran karena takut kehilangan akses ke pasar dan sistem keuangan AS.⁹

Penetapan *Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC) sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Luar Negeri AS pada 2019 semakin menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi militer dan simbolis. Puncaknya adalah serangan udara AS yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani pada 3 Januari 2020, yang merupakan tindakan militer terbuka paling signifikan terhadap Iran sejak krisis penyanderaan 1979.¹⁰

Dari perspektif neorealisme, kebijakan ini mencerminkan strategi *balancing through pressure* yang dilakukan oleh negara hegemon untuk mempertahankan dominasi sistem internasional yang dinilainya terganggu oleh kebangkitan regional Iran. Dalam sistem yang bersifat anarkis, AS menggunakan kekuatan struktural dan materialnya untuk menciptakan tata aturan baru yang lebih sesuai dengan preferensi strategisnya.¹¹ Sementara

⁷ Katzman, Kenneth. *Iran Sanctions*. Congressional Research Service, 2020.

⁸ Ibid.

⁹ International Crisis Group. *The Iran Nuclear Deal at Four: A Requiem?*, 2020.

¹⁰ BBC News. "Qassem Soleimani: US kills top Iranian general in Baghdad air strike." 3 January 2020.

¹¹ Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. McGraw-Hill, 1979.

itu, keengganan Trump terhadap multilateralisme juga menggarisbawahi preferensi kebijakan luar negeri berbasis unilateral yang memaksimalkan otonomi keputusan nasional dan meminimalkan kompromi dengan mitra internasional.¹²

Dampak terhadap Program Nuklir Iran

Secara paradoks, kebijakan maximum pressure yang secara teori ditujukan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir justru berujung pada reaktivasi dan ekspansi program tersebut. Setelah keluarnya AS dari JCPOA, Iran memulai serangkaian pelanggaran terhadap kesepakatan sebagai bentuk tekanan balik. Iran menaikkan tingkat pengayaan uranium menjadi 4,5% pada pertengahan 2019, dan kemudian meningkatkannya hingga 60% pada 2021 jauh di atas ambang batas 3,67% yang diizinkan oleh JCPOA.¹³ Selain itu, Iran mengaktifkan sentrifugal generasi baru IR-6 dan IR-8, serta membatasi akses IAEA terhadap kamera pengawasan dan fasilitas inspeksi lainnya.¹⁴

Iran membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa sanksi AS merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan, dan bahwa negara-negara Eropa gagal memenuhi janji mereka untuk memberikan keuntungan ekonomi sebagai kompensasi atas kepatuhan Iran. Iran juga menekankan bahwa tindakan mereka dapat dibalik jika sanksi dicabut dan AS kembali ke JCPOA tanpa prasyarat.¹⁵ Dari sudut pandang strategis, langkah-langkah Iran ini menunjukkan bahwa negara tersebut tidak berniat tunduk pada tekanan, melainkan meningkatkan leverage untuk negosiasi masa depan.

Dalam kerangka teori neorealisme, Iran bertindak sebagai aktor rasional dalam sistem yang tidak memiliki otoritas tertinggi (anarkis). Ketika struktur hubungan kekuasaan berubah dalam hal ini, dengan keluarnya AS dari perjanjian dan penerapan sanksi keras maka Iran merespons dengan memperkuat kapasitas strategis internalnya, termasuk dengan membangun deteren nuklir sebagai alat tawar strategis terhadap tekanan eksternal.¹⁶

¹² Jentleson, Bruce W. *American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century*. W.W. Norton, 2014.

¹³ IAEA. *Verification and Monitoring in Iran*. GOV/2021/39, 2021.

¹⁴ Ibid.

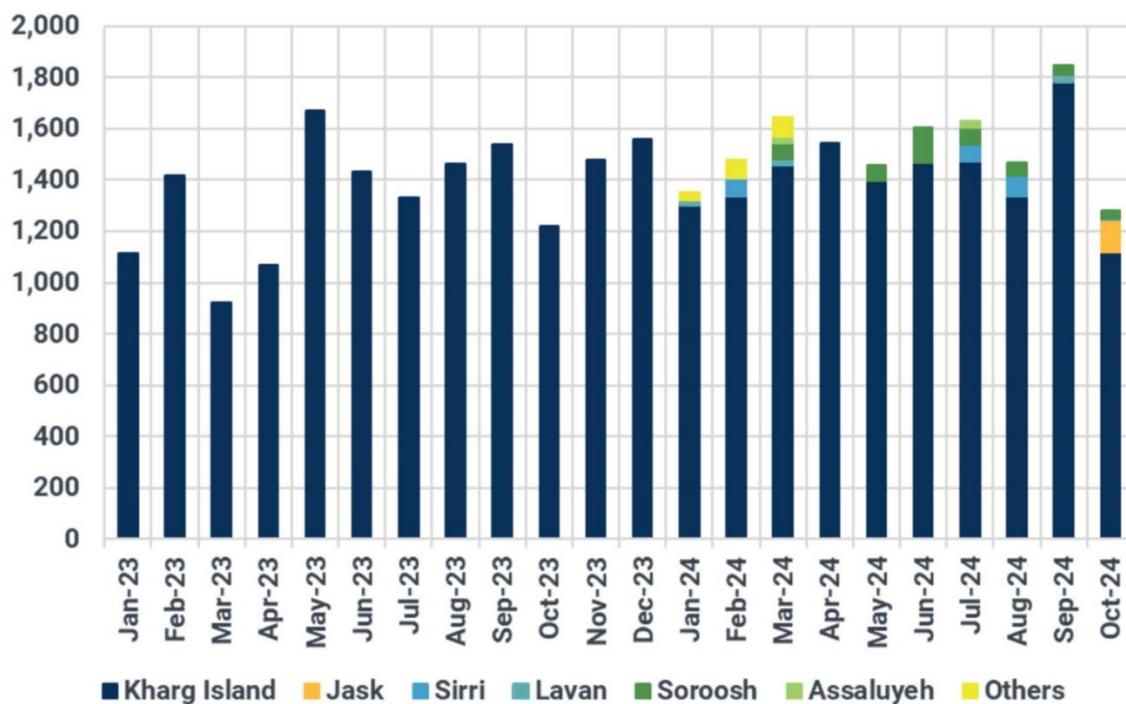
¹⁵ Al Jazeera. "Iran says nuclear steps reversible if US lifts sanctions." July 2021.

¹⁶ Waltz, *Theory of International Politics*, 1979.

Dampak terhadap Ekonomi Iran

Efek paling nyata dari kebijakan *maximum pressure* tampak dalam sektor ekonomi Iran. Data dari IMF dan Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Iran mengalami kontraksi hingga -6,8% pada 2019. Ekspor minyak—yang sebelumnya menyumbang lebih dari 40% pendapatan negara—turun lebih dari 80% akibat sanksi, dari 2,5 juta barel per hari menjadi sekitar 300 ribu barel per hari.¹⁷ Inflasi melonjak ke angka 40%–50% di beberapa wilayah, nilai tukar rial terhadap dolar AS merosot drastis, dan tingkat pengangguran meningkat, terutama di kalangan pemuda perkotaan.¹⁸

Iranian Oil Export by Port of Origin



Dampak sosial dari krisis ekonomi ini terlihat dalam bentuk protes massa, ketidakpuasan rakyat, dan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah domestik Iran. Akan tetapi, alih-alih melemahkan fondasi kekuasaan rezim, sanksi justru dijadikan alat propaganda oleh elite Iran

¹⁷ IMF. *Islamic Republic of Iran: Article IV Consultation Report*, 2020.

¹⁸ World Bank. *Iran Economic Monitor*, Fall 2020.

untuk menuduh AS melakukan perang ekonomi dan memperkuat semangat nasionalisme perlawanan.¹⁹

AS juga menggunakan instrumen hukum domestik, seperti Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) dan yurisdiksi OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), untuk menyasar jaringan ekonomi dan keuangan Iran secara global. Dengan ini, AS memanfaatkan kekuatan dolar sebagai *currency of settlement* dalam perdagangan internasional untuk memaksakan kepatuhan global bukti nyata dari kekuatan struktural yang dimiliki oleh negara hegemonik dalam sistem ekonomi internasional.²⁰

Respons Strategis Iran dan Kegagalan AS

Iran merespons tekanan dengan berbagai cara, baik di bidang diplomasi, militer, maupun geopolitik. Di tingkat internasional, Iran memperdalam kerja sama strategis dengan Rusia dan Cina. Pada 2021, Iran menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang dengan Cina senilai \$400 miliar, yang mencakup sektor energi, infrastruktur, dan militer.²¹ Di sisi lain, Iran juga meningkatkan aktivitas regionalnya melalui dukungan terhadap kelompok milisi dan perluasan pengaruh di Suriah, Irak, dan Yaman.

Di tingkat domestik, Iran memanfaatkan narasi “perlawanan terhadap imperialisme” sebagai strategi konsolidasi politik dan penguatan legitimasi rezim di tengah tekanan eksternal yang semakin besar. Narasi ini secara historis telah menjadi bagian dari identitas ideologis Republik Islam sejak Revolusi 1979, dan dalam konteks kebijakan *maximum pressure*, narasi tersebut dihidupkan kembali untuk menggalang dukungan publik serta mengalihkan perhatian dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Pemerintah Iran menempatkan Amerika Serikat sebagai simbol kekuatan hegemonik dan “musuh luar”, sehingga tekanan dari AS justru dijadikan pembenaran untuk memperkuat kontrol negara terhadap masyarakat sipil dan menekan oposisi.

¹⁹ Nematpour, Leila, and Mohsen Shariati. “Iran's Defense Strategy in the Face of Trump's Sanctions.” *Iranian Review of Foreign Affairs*, vol. 10, no. 1, (2020)

²⁰ Strange, Susan. *The Retreat of the State*. Cambridge University Press, 1996.

²¹ The Diplomat. “China and Iran Sign 25-Year Cooperation Agreement.” March 2021.

Dalam proses ini, *Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC) mendapatkan peran yang semakin besar, tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan politik. IRGC menguasai berbagai sektor strategis seperti konstruksi, energi, perbankan, dan telekomunikasi melalui jaringan perusahaan afiliasi, termasuk *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* dan berbagai *bonyad* (yayasan ekonomi semi-negara). Peran ekonomi yang luas ini memberi IRGC kekuatan finansial dan politik yang sangat besar, memungkinkan mereka menjadi aktor utama dalam pengambilan kebijakan domestik maupun regional.²² Selain itu, IRGC memainkan peran penting dalam pengawasan politik internal, termasuk dalam menekan kelompok reformis dan liberal yang dianggap tidak sejalan dengan garis keras revolusioner.

Di bawah tekanan kebijakan *maximum pressure*, pemerintah Iran juga semakin mengonsolidasikan kekuasaan di tangan kelompok konservatif dan ultra-konservatif, termasuk di lembaga-lembaga strategis seperti Dewan Penjaga Konstitusi (*Guardian Council*), Dewan Kebijakan Penentuan Kepentingan (*Expediency Council*), dan bahkan dalam struktur kepresidenan. Terpilihnya Ebrahim Raisi sebagai Presiden pada 2021—yang dikenal sebagai tokoh garis keras dan loyal terhadap Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei—menunjukkan bahwa arah kebijakan Iran bergerak menjauhi kompromi dan diplomasi berbasis liberalisasi, menuju model pemerintahan yang lebih ideologis dan sentralistik.²³

Konsolidasi ini berdampak langsung terhadap penyempitan ruang oposisi politik dan pengurangan kebebasan sipil. Banyak tokoh reformis dan aktivis ditangkap, dibungkam, atau dikucilkan dari ruang publik. Pemilihan umum dilaksanakan dalam kondisi represif, dengan banyak kandidat reformis didiskualifikasi. Oposisi moderat yang sebelumnya menjadi jembatan dialog dengan Barat kehilangan kekuatan politik dan institusional untuk mendorong kebijakan keterbukaan. Hal ini menciptakan lingkungan domestik yang kurang mendukung bagi upaya diplomatik, karena pihak-

²² Nematpour, Leila, and Mohsen Shariati. "Iran's Defense Strategy in the Face of Trump's Sanctions." *Iranian Review of Foreign Affairs*, vol. 10, no. 1, (2020) 15–18.

²³ Azizi, Hamidreza, et al. "Iran's Strategic Calculations in the Face of US Maximum Pressure." *Middle East Policy*, vol. 28, no. 2, (2021) 47–49.

pihak yang cenderung membuka diri terhadap perundingan dengan Barat tidak lagi memiliki posisi yang kuat dalam struktur kekuasaan.

Dengan demikian, strategi *maximum pressure* yang dirancang untuk “melemahkan rezim” Iran secara tidak langsung justru menciptakan efek sebaliknya: memperkuat posisi aktor-aktor paling keras dalam struktur kekuasaan Iran, mempersempit ruang gerak kelompok moderat dan reformis, serta merusak prospek dialog yang selama ini dibangun melalui jalur diplomatik. Ketika tekanan ekonomi, diplomatik, dan militer diarahkan secara intensif kepada suatu negara, tanpa disertai dengan jalur komunikasi atau tawaran insentif yang kredibel, maka negara target cenderung mengartikannya bukan sebagai dorongan untuk berkompromi, melainkan sebagai bentuk agresi terhadap identitas nasional dan eksistensi negara itu sendiri.

Dalam konteks Iran, tekanan maksimum dari Amerika Serikat dimaknai oleh elite penguasa bukan sekadar sebagai sanksi ekonomi, melainkan sebagai upaya penggulingan rezim dan perusakan kedaulatan. Narasi ini kemudian dimobilisasi secara sistematis oleh rezim untuk membenarkan pengetatan kontrol internal dan represi terhadap oposisi. Kebijakan luar negeri yang agresif dari luar negeri memberikan pembenaran bagi negara otoriter untuk mengonsolidasikan kekuasaan di dalam negeri, dengan mengklaim bahwa perpecahan politik domestik adalah bentuk kelemahan di tengah perang yang sedang berlangsung.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Iran. Dalam banyak studi hubungan internasional, diketahui bahwa tekanan eksternal yang tinggi sering kali mendorong negara-negara dengan sistem politik semi-otoriter atau hibrida untuk memusatkan kekuasaan, menghilangkan pluralisme, dan memperkuat peran aktor keamanan sebagai pelindung rezim. Hal ini dikenal dalam literatur sebagai “*rally-around-the-flag effect*”, di mana ancaman dari luar membuat masyarakat bersatu di belakang pemimpin, bahkan jika pemimpin tersebut tidak populer atau gagal secara ekonomi. Dalam kasus Iran, tekanan ekonomi berat tidak menghasilkan perubahan perilaku masyarakat dalam mendesak rezim, tetapi justru memperkuat dominasi

kelompok revolusioner yang menggunakan ideologi anti-imperialisme sebagai alat mobilisasi politik.²⁴

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam hal ini gagal membaca dinamika internal Iran, terutama terkait konflik antara kelompok reformis dan konservatif. Jika pendekatan yang digunakan terlalu represif dan bersifat all-or-nothing, maka aktor reformis kehilangan argumen untuk mendorong keterlibatan internasional. Ketika semua tekanan berasal dari satu arah dan tidak ada insentif yang ditawarkan, kelompok-kelompok moderat cenderung tersingkir dalam kompetisi domestik karena tidak mampu menunjukkan hasil konkret dari pendekatan lunak atau dialog dengan Barat.

Lebih jauh, strategi tekanan maksimum juga memicu pembentukan politik ketahanan (*resistance politics*) di dalam negeri Iran, yang mengakar pada ideologi revolusioner dan simbolisme perlawanan terhadap hegemoni Barat. Dalam kondisi seperti ini, kompromi diplomatik dipandang sebagai bentuk kelemahan atau pengkhianatan terhadap nilai-nilai revolusi. Hal ini menjadikan kebijakan luar negeri AS bukan hanya tidak efektif, tetapi juga secara tidak langsung menguatkan unsur-unsur paling ekstrem dalam sistem politik Iran, serta memperpanjang siklus konflik dan ketidakpercayaan antar kedua negara.

Oleh karena itu, pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa kebijakan koersif, jika tidak dirancang dengan sensitivitas terhadap politik domestik negara target, justru dapat menciptakan *backfire* atau efek balik yang kontraproduktif. Negara yang ditekan tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi menjadi lebih tertutup, lebih represif, dan lebih tidak kompromistis. Hal ini membuat pencapaian tujuan strategis menjadi semakin sulit, dan bahkan dapat memperburuk ketegangan jangka panjang. Pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani pada Januari 2020 menjadi titik eskalasi besar. Soleimani bukan hanya tokoh militer, tetapi juga simbol nasional dan strategis bagi Iran. Serangan udara AS terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan deklarasi konflik terbuka. Iran

²⁴ Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, vol. 6, no. 3, (1969) 167–191.

membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Ain al-Asad, Irak, menggunakan rudal balistik yang diklaim sebagai tindakan "proporsional".²⁵

Namun, semua respons ini tidak mengarah pada perubahan kebijakan seperti yang diinginkan AS. Tekanan maksimum gagal mencapai perubahan perilaku substansial, dan malah memperkuat struktur kekuasaan internal Iran. Seperti dicatat oleh Fiedler, strategi tekanan ekonomi tanpa dibarengi diplomasi hanya memperkuat posisi kelompok radikal dan memperkecil ruang kompromi politik.²⁶ Dengan demikian, kebijakan *maximum pressure* menunjukkan keterbatasannya sebagai instrumen tunggal dalam hubungan internasional yang kompleks.

3. KESIMPULAN

Kebijakan *maximum pressure* yang diterapkan oleh pemerintahan Donald J. Trump terhadap Iran selama periode 2018–2020 menghasilkan dua dampak utama yang kontras dan saling bertolak belakang. Di satu sisi, kebijakan tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya untuk menciptakan tekanan ekonomi yang sangat besar terhadap Republik Islam Iran. Sanksi primer dan sekunder, pemutusan akses Iran dari sistem keuangan global seperti SWIFT, serta pembatasan perdagangan energi berhasil membuat perekonomian Iran berada dalam kondisi krisis. Ekspor minyak Iran anjlok drastis, pendapatan negara menurun tajam, inflasi melonjak, dan nilai tukar mata uang nasional mengalami depresiasi parah. Bahkan, banyak perusahaan asing menarik investasinya dan menghentikan operasi di Iran karena takut terkena penalti dari otoritas Amerika Serikat. Semua ini memperlihatkan keberhasilan AS dalam memanfaatkan kekuatan strukturalnya di bidang ekonomi dan keuangan internasional sebagai alat tekanan non-militer yang sangat efektif.

Namun, keberhasilan di bidang ekonomi tidak diikuti oleh keberhasilan dalam tujuan utamanya: mencegah Iran mengembangkan atau melanjutkan program nuklir. Justru, setelah keluarnya AS dari JCPOA, Iran secara bertahap melanggar ketentuan perjanjian dan meningkatkan aktivitas

²⁵ Reuters. "Iran launches missiles at U.S. forces in Iraq." 8 January 2020.

²⁶ Fiedler, Christina. "Maximum Pressure Strategy." *Global Affairs Review*, vol. 4, no. 1, (2020)

pengayaan uranium, memperluas fasilitas nuklir, serta membatasi akses lembaga pengawas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tekanan maksimum yang beroperasi tanpa pendekatan diplomasi, insentif, atau kerangka negosiasi gagal mencapai perubahan perilaku strategis yang diharapkan.

Dalam konteks teori hubungan internasional, kegagalan ini mencerminkan keterbatasan pendekatan *coercive diplomacy* yang hanya menekankan tekanan satu arah tanpa membuka ruang bagi konsesi atau dialog. Sistem internasional yang bersifat anarkis memaksa negara untuk bertindak berdasarkan prinsip *self-help* demi menjamin kelangsungan dan keamanan nasionalnya. Bagi Iran, tekanan ekonomi dan isolasi internasional tidak dipandang sebagai alasan untuk tunduk, melainkan sebagai sinyal ancaman eksistensial yang harus direspon dengan peningkatan kapasitas strategis, termasuk program nuklir sebagai alat deterensi dan daya tawar. Lebih jauh, kebijakan *maximum pressure* memperkuat posisi politik kelompok garis keras dalam internal Iran, mengurangi ruang gerak faksi moderat yang sebelumnya mendukung keterlibatan internasional, dan menghambat kemungkinan kembalinya diplomasi. Dengan menghilangkan insentif ekonomi dan membatalkan kesepakatan yang sebelumnya disepakati secara multilateral, AS kehilangan legitimasi moral di mata komunitas internasional dan menurunkan kredibilitasnya sebagai mitra perjanjian jangka panjang.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai perubahan strategis yang berkelanjutan terhadap negara seperti Iran, pendekatan yang digunakan harus bersifat komprehensif, menggabungkan tekanan ekonomi dengan diplomasi terbuka dan insentif yang jelas. Kombinasi dari *carrot and stick* akan lebih efektif dalam membentuk ulang perilaku negara target daripada tekanan sepihak yang tidak disertai ruang kompromi. Pendekatan multilateral yang melibatkan aktor-aktor internasional lainnya, seperti Uni Eropa, Rusia, dan Cina, juga akan memberikan tekanan politik yang lebih sah dan membuka kemungkinan kerja sama regional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun kebijakan *maximum pressure* mampu melemahkan ekonomi Iran dalam jangka pendek, kebijakan ini gagal mencapai tujuan strategis jangka panjang Amerika Serikat dalam mencegah proliferasi nuklir dan menciptakan stabilitas kawasan. Evaluasi kritis terhadap kebijakan ini penting tidak hanya untuk memahami dinamika AS–Iran, tetapi juga sebagai pelajaran bagi desain kebijakan luar negeri ke depan yang lebih mengedepankan prinsip keterlibatan, konsistensi, dan kerja sama internasional dalam menghadapi isu-isu keamanan global yang kompleks seperti proliferasi nuklir.

REFERENSI

- Azizi, Hamidreza, et al. "Iran's Strategic Calculations in the Face of US Maximum Pressure." *Middle East Policy*, vol. 28, no. 2, 2021, pp. 44–60.
- BBC News. "Qassem Soleimani: US Kills Top Iranian General in Baghdad Air Strike." *BBC News*, 3 Jan. 2020, www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463. Accessed 5 Aug. 2025.
- Fiedler, Christina. "Maximum Pressure Strategy: A Critical Assessment of US Sanctions Policy toward Iran under Donald Trump." *Global Affairs Review*, vol. 4, no. 1, 2020, pp. 1–15.
- International Atomic Energy Agency (IAEA). *Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in Light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015)*. GOV/2019/55, 2019.
- International Atomic Energy Agency (IAEA). *Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran Pursuant to Resolution 2231 (2015)*. GOV/2021/39, 2021.
- International Crisis Group. *The Iran Nuclear Deal at Four: A Requiem?*. International Crisis Group, 2020.
- International Monetary Fund (IMF). *Islamic Republic of Iran: Staff Report for the 2019 Article IV Consultation*. IMF Country Report No. 20/21, 2020.
- Jentleson, Bruce W. *American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century*. W. W. Norton & Company, 2014.
- Katzman, Kenneth. *Iran Sanctions*. Congressional Research Service, 2020.
- Nematpour, Leila, and Mohsen Shariati. "Iran's Defense Strategy in the Face of Trump's Sanctions." *Iranian Review of Foreign Affairs*, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 5–32.
- Reuters. "Iran Launches Missiles at U.S. Forces in Iraq." *Reuters*, 8 Jan. 2020, www.reuters.com/article/us-iraq-security-iran-strike-idUSKBN1Z72DI. Accessed 5 Aug. 2025.
- Strange, Susan. *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge University Press, 1996.
- The Diplomat. "China and Iran Sign 25-Year Cooperation Agreement." *The Diplomat*, 27 Mar. 2021, thediplomat.com/2021/03/china-and-iran-sign-25-year-cooperation-agreement. Accessed 5 Aug. 2025.
- Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. McGraw-Hill, 1979.
- World Bank. *Iran Economic Monitor: Weathering the Pandemic*. Fall 2020, www.worldbank.org/en/country/iran/publication/iran-economic-monitor-weathering-the-pandemic. Accessed 5 Aug. 2025.